

SOSIALISASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

Ni Putu Trisya Putri Larasati, Kadek Julia Mahadewi

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional
Trisyaputri04@gmail.com, juliamahadewi@undiknas.ac.id

Abstract

The implementation of the One-Stop Integrated Service Program (PTSP) at the Singkil Class II District Court, providing services to justice-seeking communities is still not perfect. The speed of service and transparency in is still lacking. Likewise, inefficient service times are very detrimental to the receiving community, so this causes gratuities and cannot support corruption-free programs. This research aims to find out how to implement the PTSP program at the Military Court III-14 Denpasar, and to find out what are the obstacles faced by the agency to the implementation of PTSP at the Military Court III-14 Denpasar. So that the author carries out a one-stop integrated service socialization program at the Military Court III-14 Denpasar. The implementation of the socialization of the One Stop Integrated Service system or PTSP was carried out in the meeting room of the Military Court III-14 Denpasar so that the audience could understand the effectiveness of the PTSP system at the Military Court III-14 Denpasar. The method that the servant uses is the implementation and counseling method where the servant will get direct feedback from the audience. This method is very effective because the servant can see whether the audience can understand what the servant explains in this socialization.

Keywords: Socialization, Implementation, One Stop Integrated Service.

Abstrak

Pelaksanaan Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Negeri Singkil Kelas II, memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan masih belum sempurna. kecepatan pelayanan dan transparansi dalam masih kurang. Begitu pun juga waktu pelayanan yang kurang efisien sangat merugikan masyarakat penerima layanan, sehingga hal ini menimbulkan terjadinya gratifikasi serta tidak dapat mendukung program bebas korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan program PTSP di Pengadilan Militer III-14 Denpasar, dan untuk mengetahui Apa saja kendala yang dihadapi oleh instansi terhadap penerapan PTSP di Pengadilan Militer III-14 Denpasar. sehingga penulis melaksanakan program sosialisasi pelayanan terpadu satu pintu di Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Pelaksanaan sosialisasi sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP ini dilaksanakan di ruang rapat Pengadilan Militer III-14 Denpasar agar para audience bisa memahami efektivitas sistem PTSP di Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Metode yang pengabdian gunakan adalah metode pelaksanaan dan penyuluhan dimana pengabdian akan mendapatkan umpan balik langsung dari audience. Metode ini sangat efektif karena pengabdian bisa melihat apakah para audience bisa mengerti apa yang pengabdian jelaskan dalam sosialisasi ini.

Kata kunci: Sosialisasi, Penerapan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

PENDAHULUAN

Di era globalisasi yang serba mudah dan cepat ini banyak pelayanan publik khususnya di lembaga pemerintah yang terus meningkatkan pelayanannya yang bertujuan untuk

mempermudah atau memefisienkan waktu. Tidak terkecuali untuk Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan dibawahnya yang juga ikut meningkatkan dan menyederhanakan pelayanan publik dengan cara

menerapkan suatu sistem yaitu Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang bisa kita persingkat menjadi PTSP.

Melalui sistem PTSP ini MA dan jajaran Pengadilan dibawahnya ingin memberikan pelayanan yang terbaik dan efisien dalam pelayanan publik yang dimana prosesnya dimulai dari tahap pertama atau tahap awal seperti pendaftaran atau permohonan, administrasi, sampai hasil akhir seperti terbitnya sebuah dokumen. Yang dimana semua itu dilakukan di dalam satu tempat saja. Itu semua sebagai wujud keseriusan Mahkamah Agung (MA) terhadap penerapan pelayanan publik yang efisien,

Pengadilan Militer III-14 Denpasar memiliki tujuan dalam menyelenggarakan sisten PTSP ini yaitu diantara lain mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme, Dalam menyelenggarakan PTSP juga tentu saja memiliki beberapa prinsip-prinsip dasar agar sistem ini berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan awal seperti keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas.

METODE

Pelaksanaan sosialisasi sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP ini dilaksanakan di ruang rapat Pengadilan Militer III-14 Denpasar agar para audience bisa memahami efektivitas sistem PTSP di Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Metode yang pengabdi gunakan adalah metode pelaksanaan dan penyuluhan dimana pengabdi akan mendapatkan umpan balik langsung dari audience. Metode ini sangat efektif karena pengabdi bisa

melihat apakah para audience bisa mengerti apa yang pengabdi jelaskan dalam sosialisasi ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian di laksanakan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar, Yang di lakukan pada hari Senin, 26 Juni 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi penyuluhan dan mengedukasi betapa mudah dan efisiennya sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang biasa disingkat dengan PTSP di Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Setelah pengabdi melakukan sosialisasi tersebut para audience menjadi lebih tau apa itu sistem PTSP, paham bagaimana cara kerja dari sistem PTSP dan menyadari dengan adanya sistem ini membuat pelayannya publik menjadi lebih cepat dan mudah

Tahapan Melakukan Sosialisasi :

1. Sebelum mengimplementasikannya pengabdi membuat sturuktur kegiatan dan membuat materi yang akan dibagikan kepada para audience
2. Pada saat mengimplementasikan pengabdi menjelaskan pengertian sistem PTSP, bagaimana mekanismenya apa saja tujuan PTSP dan apa prinsip PTSP di Pengadilan Militer III-14 Denpasar, lalu setelah itu agar pengabdi menerima feedback, pengabdi melakukan sesi tanya jawab dengan para audience
3. Tahapan yang terakhir tentu saja melakukan dokumentasi untuk menyediakan dokumen-dokumen sebagai bukti akurat, biasanya berupa foto-foto.



Gambar 1 : Kegiatan Sosialisasi

SIMPULAN

Darii pengabdian ini dapat menarik suatu kesimpulan yaitu pelayanan public di era globalisasi ini sudah mengalamo kemajuan pesat. Pelayanan publik saat ini sudah sangat mudah dan memakan waktu yang sedikitsehingga orang-orasng bisa meefiensiakan waktunya dengan baik. Sama hal nya dengan PTSP ini yang melakukan tahap awal pendaftaran sampai terbitnya suatu dokumen hanya perlu di lakukan di satu tempat saja.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada LP2M Universitas Pendidikan Nasional dan Pengadilan Militer III-14 Denpasar atas dukungan yang diberikan dalam pelaksanaan sosialisasisini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfisyahrin, M., 2017. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Alford, J., 2002. Defining the client in the public sector: A social-exchange perspective. *Public Administration Review*, 62(12), pp. 337-346.
- Alford, J. & Hughes, O., 2008. Public value pragmatism as the next phase of public management. *The American Review of Public Administration*, 38(1), pp. 130-148.
- Anderson, E. W. & Fornell, S. K., 2004. Customer Satisfaction and Stakeholders Value. *Journal Of Marketing*, 4(3), pp. 172-185.
- Atik, R., 2005. Manajemen Pelayanan, Disertai Dengan Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Batinggi, H. A., 1997. Model Pelayanan Umum. Ujung Pandang: s.n.
- Bolin, M. & Haerenstam, A., 2008. An empirical study of bureaucratic and postbureaucratic characteristics in 90 workplaces. *Democracy*, 29(14), pp. 541-564.
- Budd, L., 2007. Post-bureaucracy and reanimating public governance: A discourse and practice ofcontinuity?. *International Journal of Public Sector Management*, 19(5), pp. 443-555.
- Caron, D. J. & Giauque, D., 2006. Civil servant identity at the crossroads:new challenges for public administrations. *International Journal of Public Sector Management*, 19(5), pp. 443-555.
- Carson, E. & Kerr, L., 2017. Australian Social Policy and the Human Services. Melbourne: Cambridge University Press.
- Claver, E. et al., 1999. Public administration: From bureaucratic culture to citizenoriented culture. *The International Journal of Public Sector Management*, 12(3), pp. 455-462.
- Considine, M. & Lewis, J. M., 2003. Bureaucracy, network, or enterprise? Comparing models

of governance in Australia,
Britain, the Netherlands, and
New Zealand. Public
Administration Review, 63(12),
pp.131-140.
Cooper & Schindler, 2014. Business
Research Method. New York:
McGrawHi